

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara berkembang tentunya memiliki fokus dalam pembangunan ekonomi sebagai fondasi utama dalam mencapai kemajuan nasional (Roosmanita & Marbun, 2022). Peningkatan kualitas dan keefektifan sumber daya yang ada di negara Indonesia merupakan upaya dari pembangunan ekonomi, khususnya sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan anggaran negara adalah fokus utama dari sumber daya potensial yang diprioritaskan. Upaya tersebut dilakukan guna mengurangi kemiskinan, membuka peluang kerja, mengoptimalkan pendapatan per kapita, meningkatkan pendidikan, meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan infrastruktur dengan dampak pada tingkat kemakmuran masyarakat yang lebih baik (Aleffin & Imaningsih, 2024).

Kemajuan pembangunan ekonomi dapat diukur dengan melihat beberapa indikator ekonomi. Indikator tersebut meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat peluang kerja, dan kestabilan harga. Tingkat pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan suatu negara untuk meningkatkan kapasitas produksinya, sementara penciptaan lapangan kerja menunjukkan sejauh mana pertumbuhan tersebut dapat menyerap tenaga kerja dan menekan jumlah pengangguran. Di sisi lain, kestabilan harga menjadi elemen penting untuk menjaga gairah konsumsi masyarakat dan membuat kondisi investasi yang terkendali. (Assidikiyah et al., 2021).

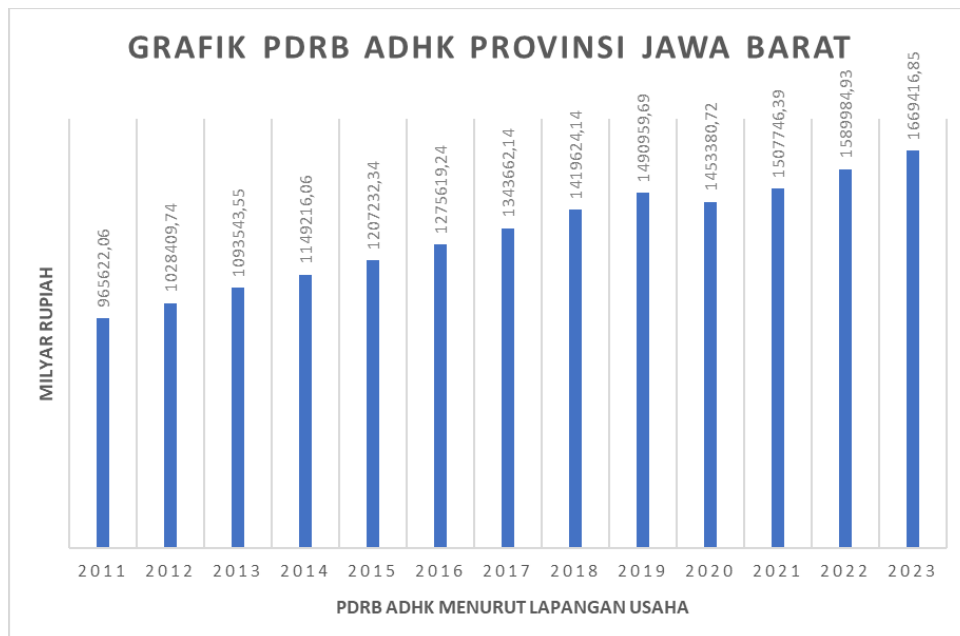
Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur yang menandakan perkembangan ekonomi dalam periode tertentu dibanding periode waktu sebelumnya (Salsabila et al., 2021). Keberlangsungan perekonomian yang berdampak pada bertambahnya pendapatan masyarakat dapat dicerminkan melalui pertumbuhan ekonomi. Perekonomian dikatakan mengalami perkembangan jika sektor-sektor ekonomi tumbuh secara signifikan, yang mencakup berbagai bidang seperti industri, perdagangan, pertanian, dan jasa. Pertumbuhan ini tidak terbatas pada peningkatan output saja, tetapi juga dari peningkatan peluang kerja, hingga akhirnya dapat menguatkan kemampuan konsumsi masyarakat. Hal tersebut dapat memperlihatkan peningkatan hasil agregat (barang dan jasa) (Haniko et al., 2022).

Indonesia menunjukkan perkembangan ekonomi yang relatif terkendali meskipun dihadapkan pada tantangan global. Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia mampu tumbuh sebesar 4,95% di tengah tingginya ketidakpastian dalam kondisi ekonomi dunia (Menko Perekonomian RI, 2024). Dapat diamati melalui data PDB yang diperoleh negara Indonesia pada tahun 2024. PDB merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian nasional dalam kurun waktu tertentu. Nilai PDB ADHK merupakan alat ukur yang dipakai, sehingga angka pertumbuhan yang didapatkan merupakan nilai riil dengan tambahan produksi dari negara tersebut (Adinda & Asmara, 2024).

Salah satu kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia ini berasal dari Pulau Jawa, yang menyumbangkan sekitar 56,84% dari keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (BPS Indonesia, 2024a). Faktor yang mempengaruhi PDB Indonesia adalah hasil dari PDRB Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu poros

ekonomi, perdagangan, dan industri di Indonesia, di mana berbagai sektor, seperti manufaktur, jasa, dan perdagangan, berkembang pesat.

Gambar 1. 1 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Prov. Jabar

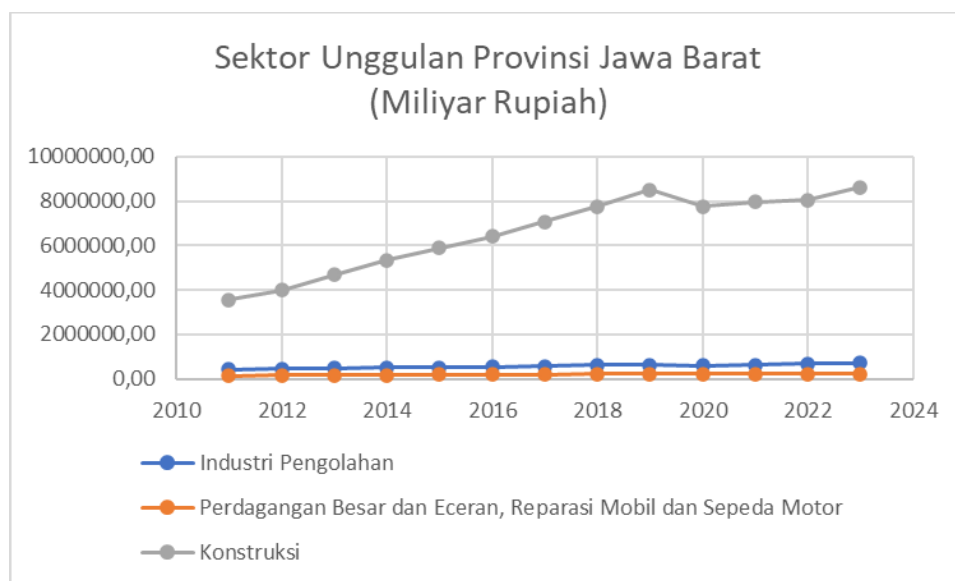


Sumber: BPS Prov Jabar

Mengacu pada gambar 1.1, dapat dilihat dari grafik pada gambar diatas menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil dari tahun 2011 hingga 2023. PDRB meningkat dari Rp 965.522,06 miliar pada 2011 menjadi Rp 1.659.416,85 miliar pada 2023, mencerminkan ekspansi ekonomi yang berkelanjutan. Namun, terjadi perlambatan pada tahun 2020 dengan PDRB sebesar Rp 1.453.380,72 miliar, yang kemungkinan besar diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memperlambat sektor industri, perdagangan, dan jasa. Pasca-pandemi, ekonomi mulai pulih dengan peningkatan PDRB menjadi Rp 1.507.746,39 miliar pada 2021 dan terus bertumbuh hingga 2023.

Tren pertumbuhan jangka panjang ini menunjukkan bahwa ekonomi Jawa Barat terus berkembang seiring dengan peningkatan investasi, konsumsi, dan produktivitas di berbagai sektor. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa meskipun sempat mengalami guncangan akibat pandemi, Jawa Barat mampu bangkit dan melanjutkan pertumbuhan ekonominya secara positif. Grafik ini menggambarkan bahwa Jawa Barat memiliki struktur ekonomi yang kuat dengan dominasi sektor industri dan perdagangan, didukung oleh pertumbuhan sektor-sektor lain yang turut berkontribusi terhadap perekonomian. Dengan tren peningkatan yang stabil hingga tahun 2023, data ini menunjukkan bahwa ekonomi Jawa Barat terus berkembang secara positif dan berkelanjutan.

Gambar 1. 2 Sektor Unggulan Provinsi Jawa Barat



Sumber : Olahan Ms. Excel

Dapat dilihat pada gambar 1.2 diatas, Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah sektor unggulan yang memiliki andil signifikan terhadap perekonomian daerah. Sektor industri pengolahan merupakan yang terbesar, dengan kontribusi meningkat

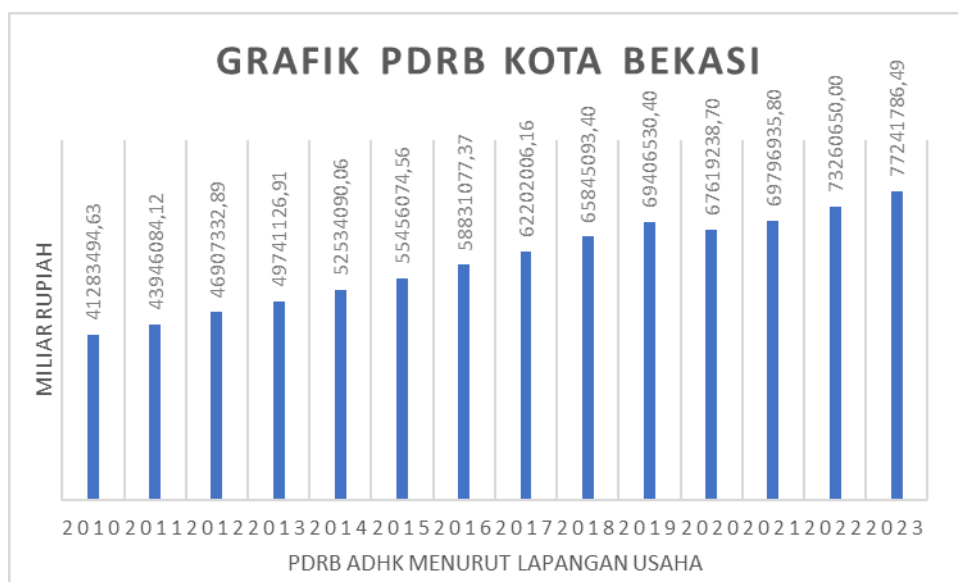
dari Rp 426.184,95 miliar pada 2011 menjadi Rp 715.806,63 miliar pada 2023. Sektor ini mencerminkan peran strategis Jawa Barat sebagai pusat industri nasional, dengan berbagai kawasan manufaktur besar yang memproduksi beragam produk unggulan, seperti tekstil, elektronik, otomotif, makanan, dan minuman.

Keberadaan kawasan industri di wilayah seperti Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, yang didukung oleh infrastruktur transportasi yang memadai, semakin memperkuat posisi sektor ini sebagai tulang punggung ekonomi Jawa Barat. Selain itu, letak geografis Jawa Barat yang menguntungkan, terletak didekat DKI Jakarta yang tergolong pusat pasar utama, juga memberikan keuntungan kompetitif yang besar bagi pengembangan sektor industri pengolahan di provinsi ini. Sektor perdagangan besar dan eceran juga menempati posisi penting, meningkat dari Rp 151.107,16 miliar menjadi Rp 240.583,20 miliar dalam periode yang sama, didukung oleh populasi besar dan daya beli masyarakat yang terus meningkat. Sektor konstruksi juga tumbuh pesat, dari Rp 71.723,22 miliar pada 2011 menjadi Rp 133.549,61 miliar pada 2023, seiring dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, kawasan industri, dan perumahan.

Menurut (BPS Indonesia, 2024b), Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan kontribusi terbesar ketiga terhadap perekonomian Indonesia dengan jumlah PDRB ADHK sebesar 1.669 milyar rupiah, di mana Kota Bekasi menjadi salah satu pusat ekonomi yang strategis. Letaknya yang berdekatan dengan Jakarta menjadikannya bagian integral dari kawasan metropolitan Jabodetabek, pusat kegiatan ekonomi nasional. Kota Bekasi memiliki dinamika ekonomi yang kompleks, dipengaruhi oleh urbanisasi cepat, arus migrasi tenaga kerja, serta transformasi struktural yang terjadi di berbagai sektor. Sebagai kota dengan

penduduk yang terus meningkat, Bekasi menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan PDRB. Dalam konteks regional, PDRB yang berfungsi sebagai tolak ukur dalam menilai pertumbuhan PDRB, mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi regionalnya. PDRB menggambarkan jumlah keseluruhan komoditas serta layanan yang dihasilkan dalam daerah tersebut selama jangka waktu tertentu, yang dijelaskan dalam bentuk nilai nominal maupun nilai riil.

Gambar 1. 3 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kota Bekasi



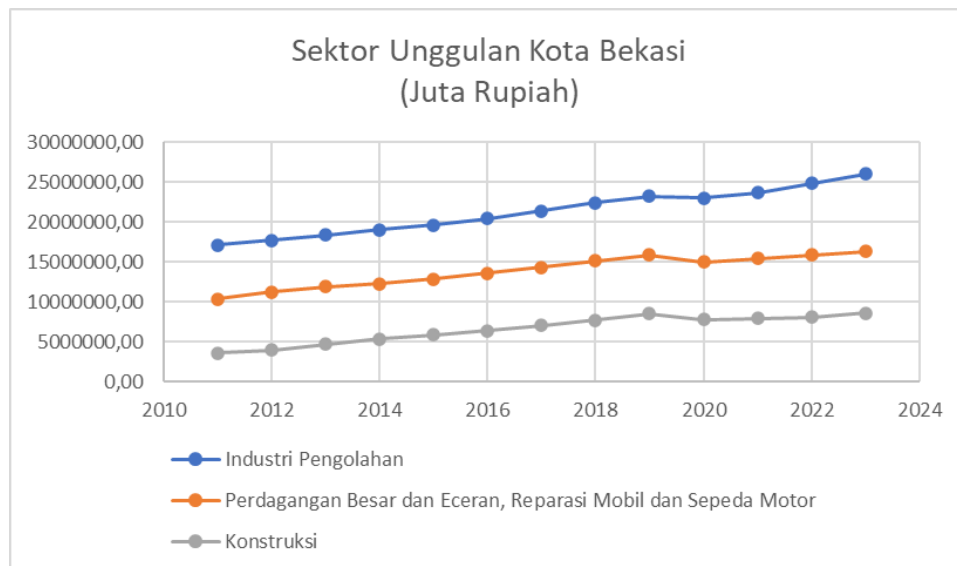
Sumber: BPS Kota Bekasi

Dapat dilihat pada gambar 1.3 data PDRB ADHK Kota Bekasi 2010-2023 menunjukkan tren pertumbuhan PDRB yang konsisten dari tahun 2010 sampai 2023. Pada tahun 2010, PDRB tercatat sebesar Rp 41.283 miliar rupiah dan terus meningkat setiap tahunnya, mencapai Rp 77.241 miliar rupiah pada 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan perkembangan sektor ekonomi yang stabil di Kota Bekasi, yang didorong oleh sektor industri, perdagangan, dan jasa. Namun, terdapat

perlambatan pertumbuhan pada tahun 2020, di mana PDRB menurun dari Rp 69.406 miliar rupiah pada 2019 menjadi Rp 67.619 miliar rupiah. Penyusutan ini besar kemungkinan diakibatkan pada saat COVID-19 yang menghambat kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, perekonomian Kota Bekasi menunjukkan pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, dengan PDRB kembali meningkat menjadi Rp 69.769 miliar rupiah pada 2021 dan terus naik hingga 2023.

Tren ini mengindikasikan bahwa Kota Bekasi memiliki ketahanan ekonomi yang baik dan terus berkembang seiring pemulihan serta peningkatan investasi dan konsumsi. Industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi, serta informasi dan komunikasi menjadi sektor utama perekonomian Kota Bekasi, didukung oleh pertumbuhan sektor kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, sektor pertanian berkontribusi kecil dan pertambahan tidak signifikan.

Gambar 1. 4 Sektor Unggulan Kota Bekasi



Sumber: Olahan Ms. Excel

Dari gambar diatas, menjelaskan bahwa Kota Bekasi memiliki beberapa sektor unggulan yang menjadi pendorong utama pertumbuhan PDRB. Sektor industri pengolahan adalah yang terbesar, dengan kontribusi signifikan terhadap PDRB, sektor ini mengalami peningkatan dari Rp 1.709.792,86 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 2.602.677,85 juta pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan peran Kota Bekasi sebagai pusat industri utama di Jabodetabek, dengan banyak kawasan industri yang memproduksi barang konsumsi, elektronik, dan otomotif. Tak hanya itu, bidang perdagangan besar dan eceran, juga reparasi kendaraan roda empat dan roda dua turut menyumbang signifikan, naik dari Rp 1.038.347,84 juta menjadi Rp 1.635.194,38 juta dalam periode yang sama, didorong oleh pertumbuhan populasi dan kebutuhan konsumsi. Sektor konstruksi juga berperan penting, dengan kontribusi naik dari Rp 356.179,66 juta menjadi Rp 863.073,59 juta, seiring dengan pembangunan infrastruktur. Ketiga sektor ini merupakan kontributor utama PDRB Kota Bekasi dari tahun 2011 hingga 2023.

Terlihat adanya tren peningkatan total PDRB yang konsisten setiap tahunnya, mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil. Sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu manufaktur serta jual beli grosir dan ritel, perbaikan kendaraan roda empat dan roda dua, memperlihatkan keunggulan aktivitas industri dan perdagangan di kota ini. Selain itu, sektor telekomunikasi serta pembangunan serta pembangunan juga berperan penting dan memberikan kontribusi yang signifikan, menandakan bahwa Bekasi berkembang pesat dalam sektor modern dan infrastruktur. Meskipun kontribusi sektor-sektor seperti Jasa Kesehatan, Pendidikan, dan Real Estate relatif lebih kecil dibandingkan sektor unggulan,

ketiganya tetap mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya. Sektor-sektor tersebut tentunya mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Kota Bekasi.

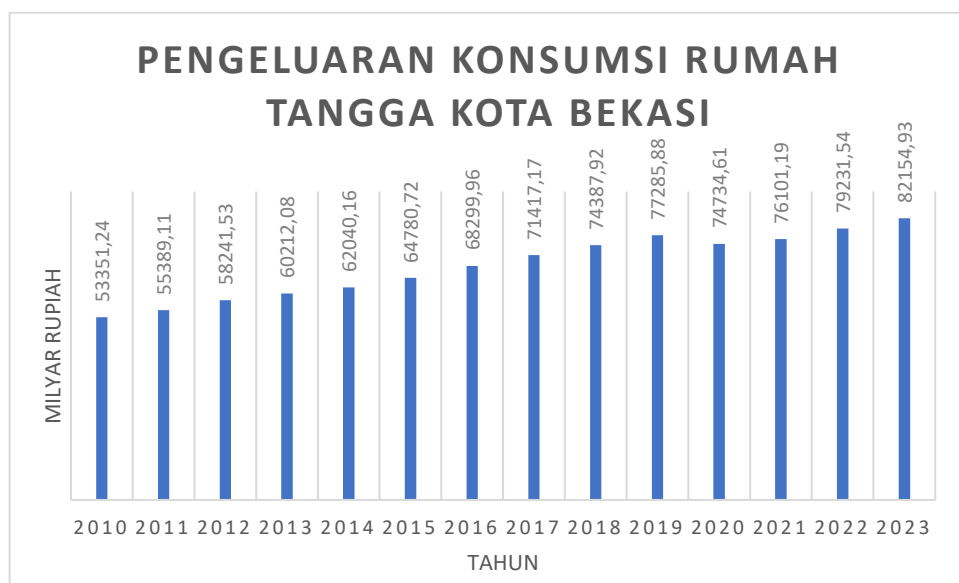
Beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan PDRB di Kota Bekasi antara lain adalah upah minimum, konsumsi rumah tangga, dan tingkat pengangguran. Upah minimum merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga memengaruhi daya saing tenaga kerja dan struktur biaya produksi. Konsumsi rumah tangga menjadi komponen terbesar dalam PDRB, didorong oleh tingginya jumlah penduduk dan peran Kota Bekasi sebagai pusat perdagangan dan industri. Sementara itu, pengangguran menjadi tantangan tersendiri, di mana tingginya tingkat pengangguran dapat menurunkan daya beli masyarakat serta menghambat pertumbuhan komoditas dan layanan.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi keynesian yang dipaparkan John Maynard Keynes, pertumbuhan ekonomi suatu daerah didorong oleh permintaan agregat. Keynes berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor upah minimum, ekspor, belanja masyarakat, penanaman modal korporasi, serta anggaran negara. Keynes percaya bahwa pasar tidak selalu mencapai keseimbangan, dan intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi pengangguran, mendorong investasi, dan merangsang pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang efektif. Konsumsi merupakan indikator dalam menentukan kesejahteraan masyarakat sekaligus faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Konsumsi akan memberikan dampak terhadap pemasukan pendapatan suatu daerah maupun negara.

Salah satu pemasukan pendapatan terbesar daerah bekasi adalah konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dapat memberikan pengaruh bagi dinamika

fluktuasi ekonomi dalam periode waktu yang ditentukan. Secara keberlanjutan, tren konsumsi, investasi, dan tabungan yang dilakukan oleh masyarakat akan berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi (Supriaman, 2024). Konsumsi rumah tangga adalah komponen utama dalam PDRB, terutama di wilayah urban seperti Kota Bekasi.

Gambar 1. 5 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Jenis Pengeluaran



Sumber: BPS Kota Bekasi

Mengacu pada gambar 1.5, pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Bekasi menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil selama periode 2010 hingga 2023. Pada tahun 2010, pengeluaran konsumsi tercatat sebesar Rp533.512,4 miliar dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga mencapai Rp821.549,3 miliar pada tahun 2023. Kenaikan ini mengindikasikan pertumbuhan daya beli masyarakat serta peningkatan aktivitas konsumsi di sektor rumah tangga yang menjadi salah satu motor utama penggerak perekonomian daerah.

Peningkatan paling signifikan terjadi pada periode 2015 hingga 2019, yang mencerminkan perbaikan ekonomi regional serta membaiknya pendapatan masyarakat. Pada tahun 2020, dimana COVID-19 terjadi mengakibatkan banyak pekerja banyak di PHK sehingga mereka tidak mendapatkan pemasukan pendapatan untuk melakukan konsumsi mereka, serta masyarakat lebih memilih untuk menahan uang mereka yang hanya memenuhi kebutuhan konsumsi pokok saja dan tidak membeli keperluan lain sehingga konsumsi rumah tangga pada tahun 2020 mengalami penyusutan. Setelah kontraksi besar pada tahun 2020, konsumsi rumah tangga kembali tumbuh dengan cepat pada tahun 2022. Ini mencerminkan pemulihan ekonomi setelah pandemi. Masyarakat terutama para pekerja yang sebelumnya mereka di PHK kemungkinan mendapatkan kembali pekerjaannya, serta mendapatkan pemasukan sehingga masyarakat dapat melakukan konsumsi mereka lebih banyak dibanding pada tahun 2020.

Pada tahun 2023, konsumsi rumah tangga menunjukkan sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi tetap berada di wilayah positif. Hal ini mungkin mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih stabil namun dengan tantangan tertentu. Tingginya jumlah penduduk serta peran Kota Bekasi sebagai pusat perdagangan menjadikan konsumsi rumah tangga sebagai faktor utama dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Pola konsumsi yang terjadi di masyarakat tidak hanya mencerminkan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mencerminkan daya beli masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendapatan dan kebijakan upah minimum yang diterapkan oleh pemerintah.

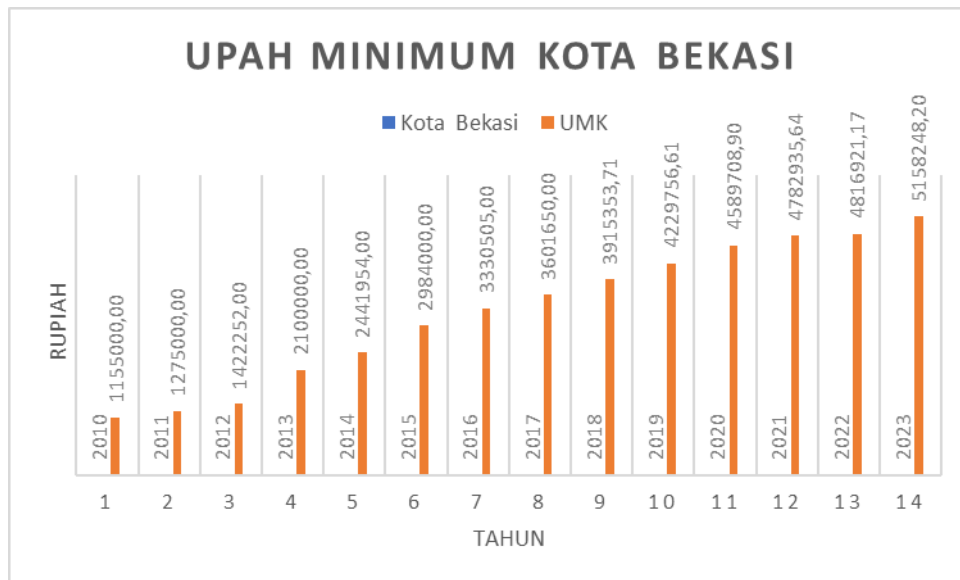
Upah minimum adalah suatu ketentuan yang diberikan oleh pemerintah mengenai batas terendah upah yang harus diberikan oleh pemilik usaha atau

pimpinan kepada pekerja sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan dalam periode tertentu. Ketentuan ini berlaku sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja untuk memastikan bahwa upah yang mereka terima sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak, sehingga para buruh mampu mencukupi kebutuhan dasar seperti, pendidikan, kesehatan, pakaian, makanan, dan lain-lain. Upah minimum juga berperan dalam menciptakan keadilan sosial di masyarakat, karena memastikan bahwa semua pekerja, tanpa memandang latar belakang atau jenis pekerjaan, mendapatkan hak yang sama untuk hidup dengan layak. Selain itu, ketentuan ini dapat mendorong peningkatan produktivitas dan motivasi kerja, karena pekerja yang merasa dihargai cenderung lebih berkomitmen dan berkontribusi secara maksimal terhadap perusahaan. Dengan demikian, upah minimum bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan cerminan dari komitmen bersama antara pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja guna membangun lingkungan kerja yang sehat dan berkesinambungan (Marliana, 2022).

Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, upah minimum tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja dengan memastikan pendapatan yang adil dan layak. Dengan demikian, upah minimum berperan penting dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong peningkatan daya beli masyarakat (Lavenia et al., 2023). Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga memiliki dampak signifikan terhadap struktur biaya operasional perusahaan, khususnya industri padat karya yang bergantung pada tenaga kerja dalam jumlah besar. Perusahaan perlu menyesuaikan strategi bisnis dan produktivitas untuk menyeimbangkan peningkatan biaya tenaga kerja dengan daya saing yang tetap terjaga. Dalam konteks Kota Bekasi, kebijakan

upah minimum sering kali menjadi topik diskusi antara pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja. Dampaknya terhadap PDRB menjadi salah satu aspek yang layak diteliti lebih lanjut.

Gambar 1. 6 UMK Kota Bekasi Periode 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Dapat dilihat gambar 1.6 diatas pertumbuhan upah minimum Kota Bekasi meningkat setiap tahunnya. Peningkatan pada tahun 2010-2014 mengalami lonjakan paling pesat, lonjakan tersebut menunjukkan adanya kebijakan agresif dalam menaikkan upah minimum. Hal ini dipengaruhi oleh desakan serikat pekerja dan penyesuaian dengan inflasi pada saat itu. Kemudian, pertumbuhan upah minimum Kota Bekasi mengalami pertumbuhan yang stabil dikarenakan penyesuaian upah minimum dilakukan secara gradual dan terukur sampai tahun 2018.

Pada tahun 2019-2021 pertumbuhan upah minimum mengalami perlambatan dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dikaitkan tantangan

ekonomi yang terjadi di seluruh dunia akibat pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020. Kenaikan upah minimum kembali terjadi pada tahun 2023, yang menandakan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi serta penyesuaian upah terhadap inflasi. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi.

Kota Bekasi, yang menjadi wilayah penyangga Jakarta tentunya bergesekan dengan dinamika ekonomi yang kompleks karena keberadaannya sebagai kawasan industri strategis yang memiliki andil pada perekonomian daerah dan negara. Dengan letak geografis yang sangat dekat dengan DKI Jakarta serta tersedianya infrastruktur pendukung seperti jalan tol, kawasan industri, dan akses transportasi yang memadai, Kota Bekasi menjadi magnet ekonomi yang menarik berbagai industri manufaktur, logistik, serta sektor jasa. Kondisi ini menjadikan Kota Bekasi sebagai tujuan utama bagi masyarakat, pendatang dari Pulau Jawa maupun dari luar Pulau Jawa, guna mencari nafkah dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

Tingginya nilai upah minimum di Kota Bekasi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di sekitarnya semakin memicu arus urbanisasi dan masuknya pendatang dari berbagai wilayah. Faktor ini tentu memberikan peluang bagi pekerja untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak, tetapi di sisi lain menciptakan tantangan baru bagi pemerintah daerah dalam mengelola dinamika ketenagakerjaan. Pertumbuhan penduduk yang pesat akibat migrasi tenaga kerja menyebabkan peningkatan jumlah angkatan kerja secara signifikan. Namun, peningkatan jumlah angkatan kerja tidak selalu berbanding lurus dengan tersedianya lapangan pekerjaan.

Ketidakselarannya jumlah tenaga kerja dan ketersediaan pasar tenaga kerja dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti meningkatnya tingkat pengangguran, persaingan ketat antarpekerja, dan potensi munculnya pekerjaan informal atau pekerja dengan upah rendah. Selain itu, tekanan terhadap fasilitas publik seperti transportasi, pemukiman, dan layanan sosial juga menjadi kendala yang perlu diatasi pemerintah daerah agar keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Dengan demikian, meskipun tingginya upah minimum di Kota Bekasi menarik perhatian bagi para pencari kerja, fenomena ini perlu diimbangi dengan kebijakan strategis dari pemerintah daerah.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi endogen yang dipaparkan Robert Lucas, pertumbuhan ekonomi modern berfokus pada faktor-faktor internal dalam mendukung perekonomian. Teori ini menekankan pentingnya investasi dalam Sumber Daya Manusia dan akumulasi pengetahuan. Hal ini bertujuan sebagai kunci utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. SDM merupakan aspek penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kualitas dan kuantitas SDM yang baik berperan signifikan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan menyeluruh.

Di tengah kemajuan teknologi yang pesat dan era globalisasi, peran SDM semakin penting sebagai penggerak inovasi, produktivitas, dan daya saing suatu negara. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor fisik seperti modal dan infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan SDM dalam mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan sumber daya tersebut. Pendidikan, pelatihan, dan kesehatan SDM menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga mampu menghadapi tantangan di pasar global.

Investasi besar-besaran dalam peningkatan kualitas SDM telah terbukti berkontribusi pada percepatan pertumbuhan ekonomi dinegara maju. Sebaliknya, negara-negara berkembang sering menghadapi tantangan dalam pengembangan SDM, seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan yang tidak sesuai kebutuhan pasar, dan akses terbatas ke layanan kesehatan. dalam era digitalisasi dan transformasi industri, peran SDM menjadi semakin kritis. Keterampilan teknologi, kemampuan adaptasi, dan kreativitas menjadi elemen penting yang harus dimiliki SDM agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi.

Sementara itu, **realita di lapangan menunjukkan bahwa pengangguran merupakan tantangan ekonomi yang signifikan di Kota Bekasi**. Dalam PERWAL P-RKPD 2024 Kota Bekasi, pengangguran masih menjadi fokus utama dari program pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB dan juga untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Gambar 1. 7 TPT Kota Bekasi Periode 2010-2023



Sumber: BPS Kota Bekasi

Mengacu pada gambar 1.7 diatas, menggambarkan tingkat pengangguran di Kota Bekasi sempat stabil pada periode 2012-2018, mengalami lonjakan tajam akibat COVID-19 pada kurun waktu 2020 sampai 2021. Meningkatnya tingkat pengangguran di Kota Bekasi selama pandemi COVID-19 dipicu oleh kombinasi dari penurunan aktivitas ekonomi, keterbatasan mobilitas tenaga kerja, penurunan konsumsi rumah tangga, serta besarnya ketergantungan pada sektor industri dan jasa yang terdampak langsung. Selain itu, ketidakselarasan angka tenaga kerja dan kesempatan kerja yang tersedia memperburuk kondisi ini. Kemudian, jumlah pengangguran mengalami peningkatan hingga tahun 2023.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah memberikan kebijakan yang mendukung terciptanya peluang kerja serta pengoptimalan SDM guna menjaga tren penurunan pengangguran secara berkelanjutan. Meskipun tingkat pengangguran terbuka di Kota Bekasi menurun pada tahun 2023 (Adinda & Asmara, 2024). Pada saat ini pemerintah Kota Bekasi masih memberikan fokus untuk mengurangi pengangguran. Salah satu faktor yang menyebabkan masih terjadinya pengangguran di Kota Bekasi adalah tingginya angka migrasi tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia.

Kota Bekasi, sebagai kawasan strategis dengan lokasi yang dekat dengan DKI Jakarta dan kawasan industri, sering kali menjadi tujuan utama para pencari kerja yang berharap mendapatkan peluang pekerjaan lebih baik (Anggraini & Warsitasari, 2023). Namun, tingginya arus migrasi ini tidak selalu diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai atau sesuai dengan kemampuan para pekerja. Akibatnya, ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan ketersediaan pekerjaan semakin memperparah angka pengangguran di wilayah ini.

Rendahnya kualitas SDM dan kurangnya pelatihan serta keterampilan yang dibutuhkan industri mempengaruhi angka pengangguran di Kota Bekasi. Kondisi ini menyebabkan banyak tenaga kerja lokal belum memiliki kompetensi spesifik yang dibutuhkan di era digitalisasi dan industri 4.0, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk menghadapi persaingan dengan tenaga kerja dari daerah lain maupun tenaga kerja yang lebih terampil.

Permasalahan tersebut mengharuskan adanya solusi yang holistik dan berkesinambungan guna memperkecil angka pengangguran di Kota Bekasi. Dalam menghadapi tantangan ini tentunya pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi pengangguran di Kota Bekasi. Kebijakan tersebut dapat berupa peningkatan keterampilan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, penciptaan lapangan kerja baru melalui investasi industri yang berkelanjutan, serta perencanaan kota yang matang untuk mengatasi dampak urbanisasi. Kemudian, meningkatkan program pelatihan berbasis keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, membuka peluang kerja baru melalui pengembangan sektor ekonomi produktif, serta penguatan wirausaha lokal yang dimaksudkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan permasalahan pengangguran di Kota Bekasi dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan, diharapkan SDM di Kota Bekasi dapat berkembang secara optimal sehingga memberikan andil positif terhadap pertumbuhan PDRB daerah dan negara, serta diharapkan Kota Bekasi dapat terus berkembang sebagai kawasan industri yang produktif sekaligus mampu menyediakan kesempatan kerja yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh penduduknya.

Interaksi antara upah minimum, konsumsi rumah tangga, dan tingkat pengangguran membentuk dinamika ekonomi yang memberikan dampak menyeluruh kepada output PDRB Kota Bekasi. Upah minimum yang ditentukan setiap tahun berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Namun, di sisi lain, jika kebijakan upah minimum tidak diiringi dengan pengoptimalan produktivitas tenaga kerja dan daya tampung dunia usaha, hal ini akan memicu lonjakan biaya tenaga kerja yang berpotensi menyebabkan pemangkasan tenaga kerja atau penghentian hubungan kerja (PHK), sehingga meningkatkan angka pengangguran.

Ketidakseimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait upah minimum, tingkat konsumsi, dan pengangguran dapat menimbulkan berbagai ketimpangan ekonomi, baik antar kelompok pendapatan maupun antar sektor ekonomi. Jika tidak dikelola dengan baik, ketimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan PDRB yang berkelanjutan, di mana sebagian masyarakat dapat menikmati manfaat ekonomi yang lebih besar sementara kelompok lainnya tertinggal. Selain itu, peningkatan pengangguran akibat kebijakan upah yang kurang tepat juga dapat menekan jumlah konsumsi rumah tangga yang akan berdampak negatif terhadap PDRB sebagai indikator utama perkembangan ekonomi suatu daerah.

Oleh karena itu, penelitian mengenai **“Pengaruh upah minimum kabupaten/kota, pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan pengangguran terhadap PDRB Kota Bekasi”** menjadi sangat relevan dan penting dilakukan. Melalui pendekatan analisis empiris yang komprehensif, studi ini bertujuan untuk memahami sejauh mana keterkaitan antara ketiga faktor tersebut dengan

pertumbuhan PDRB Kota Bekasi. Dengan demikian, studi ini tidak sekedar relevan dengan wilayah Kota Bekasi tetapi dapat menyajikan perspektif yang lebih menyeluruh tentang perubahan ekonomi di wilayah urban Indonesia. Hasil dari studi ini bisa menjadi tolak ukur kepada pembuat kebijakan dalam merancang intervensi ekonomi yang lebih optimal dan adaptif terhadap perubahan zaman, serta diharapkan bisa memberikan masukan terhadap peraturan berbasis data yang akurat dan efektif guna mendukung penciptaan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apakah upah minimum kota berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB di Kota Bekasi.
2. Apakah pengeluaran konsumsi rumah tangga berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB di Kota Bekasi.
3. Apakah tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB di Kota Bekasi.

1.3 Tujuan Masalah

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh upah minimum kota terhadap pertumbuhan PDRB di Kota Bekasi.
2. Menganalisis seberapa besar pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan PDRB di Kota Bekasi.

3. Menganalisis seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terbuka pengangguran terhadap pertumbuhan PDRB di Kota Bekasi.

1.4 Manfaat

Berdasarkan penjelasan ruang lingkup diatas, manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kepentingan teoritis

Studi ini diharapkan Memberikan gambaran terkait kondisi ekonomi di Kota Bekasi, serta Penelitian ini juga dapat memperkaya pemahaman dan model analisis empiris terkait hubungan antara kebijakan ekonomi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan PDRB daerah. Kemudian, studi ini diharapkan bisa memberikan tolak ukur kepada peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian terkait kebijakan ekonomi daerah, ketenagakerjaan, dan perkembangan PDRB, baik pada tingkat daerah maupun nasional.

2. Bagi kepentingan pemerintah

Output studi ini diharapkan bisa menjadi referensi guna mengevaluasi wilayah Kota Bekasi dalam merumuskan regulasi upah minimum yang seimbang, efektif, dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Pelaku usaha

Studi ini diharapkan akan memberikan gambaran mengenai implikasi kebijakan upah minimum kota terhadap biaya produksi dan struktur tenaga kerja, sehingga pelaku usaha dapat lebih bijak dalam merencanakan kebijakan tenaga ketenagakerjaan dan investasi mereka

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pertumbuhan PDRB di Kota Bekasi dengan menganalisis hubungan dan dampak upah minimum kota, pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan tingkat pengangguran sebagai faktor independen terhadap PDRB sebagai faktor dependen. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana kebijakan upah minimum dan kondisi ekonomi masyarakat memengaruhi perkembangan ekonomi kota tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder, termasuk statistik mengenai upah minimum, konsumsi rumah tangga, tingkat pengangguran, dan PDRB di Kota Bekasi, yang didapatkan dari BPS Kota Bekasi.

Studi ini dilakukan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu poros industri strategis di Indonesia. Sebagai kawasan dengan aktivitas ekonomi yang tinggi di sektor industri, perdagangan, dan jasa, Kota Bekasi menjadi objek kajian yang menarik untuk diteliti. Dengan menggunakan data deret waktu dari tahun 2010 hingga 2023, penelitian ini memberikan wawasan komprehensif mengenai tren upah minimum, konsumsi rumah tangga, dan tingkat pengangguran, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan PDRB dalam jangka waktu yang panjang. Melalui pendekatan kuantitatif, studi ini menerapkan analisis regresi linear berganda guna mengevaluasi dampak faktor independen terhadap PDRB sebagai faktor dependen.